

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

1. Partisipasi Warga Negara dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan bangsa salah satunya adalah dengan pendidikan. Suatu bangsa kehidupannya akan maju dan sejahtera apabila bangsa tersebut cerdas.

Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai berdasarkan pembangunan nasional yang hakekatnya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang pendidikan yang diajarkan di sekolah adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Dalam kenyataannya, PKn sering dikatakan sebagai mata pelajaran yang membosankan, tidak menarik, penuh dengan teori dan sebagainya.

Perspektif mengenai mata pelajaran PKn yang membosankan dapat semakin kuat apabila guru kurang menerapkan pembelajaran yang membangkitkan motivasi belajar siswa sehingga yang terjadi adalah minimnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar dan kecerdasan siswa kurang terasah. Apabila dibiarkan maka fungsi pendidikan tidak dapat tercapai.

Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di dasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan pada lingkungan hidup pada dasarnya juga merusak pada diri manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip *deep ecology* (Arne Naess dalam Mudhofir, 2010: 197) adalah:

1. Kesejahteraan dan perkembangan manusia dan non manusia di muka bumi memiliki nilai di dalam dirinya sendiri (seperti nilai intrinsic atau nilai inheren). Nilai-nilai tersebut tidak tergantung dari nilai non-manusia untuk tujuan-tujuan manusia.
2. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk kehidupan berkontribusi pada kesadaran nilai-nilai mereka sendiri dan juga nilai-nilai inherennya (dalam dirinya sendiri).
3. Manusia tak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keragamannya kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.
4. Perkembangan hidup dan budaya manusia sepadan dengan pengurangan substansial populasi manusia. Perkembangan kehidupan non manusia memerlukan pengurangan semacam ini.
5. Intervensi manusia modern atas dunia non manusia terlalu berlebihan, dan kondisi ini makin memburuk.
6. Karena itu, kebijakan-kebijakan harus berubah. Kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan juga ideologi. Keadaan yang dihasilkannya akan berbeda dari keadaannya semula.

7. Perubahan ideologi yang utama adalah penghormatan pada kualitas hidup (yakni berada dalam kondisi-kondisi nilai inheren) bukannya mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul kesadaran mendalam terhadap perbedaan antara yang besar dan besar sekali (*the difference between big and great*).
8. Mereka yang mendukung poin-poin diatas memiliki kewajiban untuk menerapkan perubahan-perubahan mendesak tersebut, langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman akan konteks tersebut, diharapkan akan membangun rasa kesadaran dan perasaan memiliki sebagai bagian dari suatu bangsa. Namun pada kenyataannya partisipasi Warga Negara dalam melestarikan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, mengingat bukan hanya di Indonesia melainkan dunia saat ini sedang mengalami krisis lingkungan yang berakar pada kesalahan perilaku manusia yang berakar pada kesalahan perspektif manusia tentang manusia sendiri, alam, dan hubungan antara manusia dengan seluruh alam semesta (Keraf, Sony, 2006:123).

Untuk memperbaiki kesalahan perilaku dan kesalahan pandang manusia tentang dirinya dengan lingkungannya serta melakukan perubahan fundamental tentang cara pandang tersebut, bisa melalui "*Citizenship Education*" atau "*Civic Education*". Dengan kata lain "*Citizenship Education*" atau "*Civic Education*" dapat merubah cara pandang dan perilaku manusia atau warga negara dalam memandang lingkungannya. *Civic Education*, seyogyanya memiliki jati diri: diorganisasikan secara lintas bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif; isi dan prosesnya dikaitkan pada kehidupan

nyata; diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah (Budimansyah, 2007: 29). Pengembangan *Civic Education* ini juga berkaitan erat dengan karakteristik warga negara yang disampaikan Cogan (1998). Cogan mengidentifikasi delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga Negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi:

- (1) Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga Negara masyarakat global;
- (2) Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
- (3) Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
- (4) Kemampuan berfikir kritis dan sistematis;
- (5) Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
- (6) Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa, guna melindungi lingkungan hidup;
- (7) Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb.);
- (8) Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional (Sapriya, 2004:9).

Dalam permasalahan lingkungan hidup khususnya Indonesia masih kurang adanya partisipasi Warga Negara salah satunya partisipasi hanya sebatas proyek selain itu kenyatannya masih banyak anggota masyarakat dalam hal ini oknum-oknum tertentu kurang sadar akan makna lingkungan hidup sehingga berdampak buruk pada lingkungan hidup, misalnya *illegal logging*, limbah industri pabrik, pencemaran udara, tanah, air, penebangan pohon dan lain-lain. Oleh karena itu partisipasi Warga Negara sangat dibutuhkan bukan hanya mengajak Warga Negara dalam proses pelaksanaan program ataupun proyek tetapi memberikan

kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi.

Sejatinya, masyarakat bangsa kita yang telah sedemikian rupa digembleng habis-habisan melalui berbagai program Pendidikan Kewarganegaraan (baca: *Citizenship Education*) akan menjelma sebagai warga negara yang memiliki kekuatan karsa. Setidak-tidaknya jika kita mendefinisikan “*Citizenship Education*” sebagai program pendidikan yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media (Cogan & Derricott, 1998). Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini masyarakat bangsa kita masih dihiasi oleh suatu gejala kelemahankarsaan, suatu mentalitas yang sangat tidak cocok untuk pembangunan. (Budimansyah, 2006: 305). Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam penanaman nilai, karena koridornya *value based*, nilai tersebut harus diajarkan dalam pendidikan formal maupun non formal seperti PKn kemasyarakatan (*community civics*). Sedangkan objek studi *Civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama dan negara. Sebagaimana dipaparkan oleh Somantri (2001: 276), dalam Lokakarya Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan, (1973: 214) yang termasuk ke dalam objek studi *civics* ialah:

- a) Tingkah laku,
- b) Tipe pertumbuhan berfikir,
- c) Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara,

- d) Hak dan kewajiban,
- e) Cita-cita dan aspirasi,
- f) Kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, dan moral Pancasila),
- g) Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu wadah pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*), cerdas, terampil dan berkarakter setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penanaman nilai-nilai lingkungan hidup sudah diintegrasikan kepada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam pendidikan formal meskipun pada proses pembelajaran belum sebagian guru PKn hanya sebatas memberikan materi saja belum sampai pengamalan nilai-nilai dan melestarikan lingkungan hidup.

Berbicara tentang Pendidikan Kewarganegaraan selain di persekolahan Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat kita pelajari di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Cogan dalam Budimansyah dan Suryadi (2008:5) :

citizenship education or education for citizenship...The more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen.

Berdasarkan kutipan di atas *citizenship education* atau *education for citizenship* merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam media.

Ekologi dalam (*deep ecology*) adalah cabang dari ekосоfi yang memandang umat manusia bagian integral dari lingkungannya. Ia merupakan tubuh pemikiran yang menempatkan nilai pada spesies non manusia, ekosistem dan proses-prosesnya di alam lebih dari sekedar membangun gerakan lingkungan dan gerakan hijau. Ekologi dalam (*deep ecology*) telah meletakkan sebuah sistem etika lingkungan baru. Prinsip inti *deep ecology* awalnya dikembangkan oleh doktrin egalitarianisme biosfer Arne Naess yang menyatakan bahwa sebagaimana manusia, lingkungan hidup (*the living environment*) adalah sebagai keseluruhan utuh yang memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. (Mudhofir, 2010: 194). Selanjutnya, menurut tradisi bio ekosistem dalam lingkungan terdapat dua komponen yakni komponen produsen dan komponen konsumen. Proses ekosistem dalam lingkungan hakekatnya merupakan proses daur energi, materi dan informasi antar komponen. Oleh karena itu, tata lingkungan akan tetap dalam keadaan seimbang jika komponen-komponen dalam ekosistem tersebut berproses secara normal tidak terganggu atau mengganggu. Artinya masing-masing komponen bertindak sesuai dengan peran niche ekologisnya. Apabila komponen-komponen tersebut bertindak di luar jalur niche ekologisnya sudah barang tentu akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Akibat lebih serius lagi adalah terjadinya kerusakan penyangga kehidupan, ekosistem (Abdilah, 2001: 165).

2. Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mempunyai arti penting bagi manusia, dengan lingkungan fisik manusia dapat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan

M. Syahri, 2013

Penguatan Partisipasi Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Konsep Green Moral

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

materialnya, dengan lingkungan biologi manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmaninya, dan dengan lingkungan sosial manusia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Oleh karena itu antara manusia dan lingkungan hidup selalu terjadi interaksi timbal balik.

Dewasa ini ada empat isu global menyangkut agenda pelestarian lingkungan hidup (Ismawan, 1999: 22), keempat isu tersebut, yaitu:

- a) Polusi; antara lain polusi udara, hujan asam, perubahan iklim, polusi air, polusi akibat bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah nuklir, dan seterusnya;
- b) Sumber alam; antara lain isu deforestasi, hilangnya sumber-sumber genetika, erosi tanah dan disertifikasi, problema lahan kritis, kerusakan sumber-sumber kelautan, degradasi kemampuan lahan, hilangnya lahan-lahan pertanian, dan sebagainya;
- c) Perkotaan; antara lain penggunaan tanah di kota besar, sanitasi lingkungan, air bersih, manajemen pertumbuhan kota, kesejahteraan sosial dan pendidikan, lingkungan dan perumahan kumuh, penghijauan di kota besar, dan seterusnya;
- d) Manajemen; antara lain *monitoring* dan pelaporan, analisis investasi, analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*), efektifitas biaya (*cost effectiveness*), analisis resiko, juga mencakup AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam sebuah proyek.

Keempat problema tersebut telah memasuki stadium yang sangat krusial. Polusi misalnya, menimbulkan problema yang harus dipikul secara bersama oleh seluruh umat manusia. Dampak berkumpulnya gas polutan merusak lapisan ozon.

Penurunan kualitas sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa berikutnya.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Al Qur'an Surat. Ar-Ruum, 30:41). Makna ayat diatas menggambarkan betapa eratnya keterkaitan antara sikap manusia dan lestari tidaknya lingkungan tempat manusia itu tinggal. Keseimbangan ekosistem yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kehidupan yang harmoni dalam segala aspek, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Pembangunan yang integralistik dan holistik adalah langkah ideal dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan ekosistem di alam. Kenyataanya, pembangunan lebih diarahkan atau dititikberatkan pada aspek ekonomi semata dan mengabaikan nilai-nilai humanis. Pandangan manusia terhadap alam lingkungan (ekosistem) dapat dibedakan atas dua golongan yakni pandangan imanen (holistik) dan *transcendent*. Menurut pandangan holistik, manusia dapat memisahkan dirinya dengan sistem biofisik sekitarnya, seperti dengan hewan, tumbuhan, sungai dan gunung, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik itu sehingga membentuk satu kesatuan sosio-biofisik. Menurut pandangan *transcendent*, kehidupan secara ekologi merupakan bagian dari lingkungannya, manusia merasa terpisah dari lingkungannya, lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya (Iskandar, 2001: 27).

Keterkaitan alami atau keterkaitan ekosistem mendefinisikan batas alam interaksi keberadaan seluruh unsur alam, kehidupan dan manusia dalam satu ruang yang sama (Purwasasmita, 2011: 27). Pemanasan global (*global warming*) beberapa tahun terakhir ini menjadi isu sentral, hal ini menjadi pembicaraan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Peningkatan temperatur bumi dari tahun ke tahun akibat akumulasi gas di atmosfer yang menyelimuti bumi merupakan fenomena alam. Di Indonesia tanda-tanda terjadinya perubahan iklim tampak jelas, mulai dari pergeseran musim kemarau dan musim penghujan, terjadinya ombak yang tinggi, meluasnya kekeringan, terjadinya banjir dimana-mana dan angin puting beliung, kerusakan lingkungan tidak terelakan. Gunung gundul, hutan meranggas, tanah gersang ada di mana-mana, debit air sungai berkurang, sumber mata air banyak yang mati, sementara orang-orang tidak ambil peduli, masing-masing berpacu mencari rizki untuk hidupnya sendiri-sendiri. Mereka lupa bahwa pemanasan global mengejar manusia, lapisan ozon tiap detik, tiap menit, tiap jam semakin menipis. Akibat itu semua adalah perubahan iklim yang tidak menentu, munculnya penyakit-penyakit baru baik yang menimpa manusia, hewan maupun tumbuhan, yang lebih fatal sinar matahari langsung menembus bumi tanpa ada penghalang lapisan ozon sehingga panas luar biasa dan semua benda di muka bumi terbakar. Melihat kondisi yang sudah amat mengawatirkan tersebut selain mengadakan seminar-seminar nasional, regional maupun internasional yang diselenggarakan di hotel-hotel berbintang yang membicarakan kerusakan lingkungan, perlu juga adanya langkah kongkrit untuk penyadaran dan penguatan masyarakat tentang pentingnya menjaga pelestarian lingkungan hidup.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi nasional sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua elemen baik itu pemerintah maupun Warga Negara. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam azas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi Negara kita. Pasal 33 ayat (4) itu menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan”. Masalahnya adalah apa yang dimaksudkan dengan kata-kata “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” dalam ketentuan pasal 33 ayat (4) itu (Asshiddiqie, 2010: 133). Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu perwujudan dari wawasan lingkungan dimaksud dalam UUD 1945 dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan juga harus diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Asshiddiqie, 2010: 134). Harapan akan “pembangunan yang berkesinambungan” didasarkan pada hasil pengamatan bahwa tidak semua “pembangunan” merusak lingkungan. Tujuan awal kelompok pembela lingkungan menuju nol”, jika pertumbuhan tersebut mengandung arti tidak lebih dari

pertumbuhan nol bagi aktivis yang merusak lingkungan, tidak akan cukup untuk mencegah kerusakan jangka panjang terhadap biosfer, dikatakan Jacobs (Low, 2009: 17). Selain itu, penjaminan terhadap kesinambungan lingkungan hidup ditentukan oleh struktur ekosistem, perkembangan nilai, dan perkembangan kelembagaan. (Purwasasmita,2011: 29).

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses sosial dan ekologis untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan dapat dibagi menjadi 3 aspek : keberlanjutan lingkungan hidup, keberlanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial politik. UNESCO tahun 2001 mendeklarasikan “bahwa keberagaman budaya sangat penting bagi manusia, seperti halnya keberagaman hayati bagi alam”. Dalam hubungan ini beberapa peneliti mendefinisikan bahwa lingkungan (*environment*) adalah kombinasi dari alam (*nature*) dan budaya (*culture*). Jadi pembangunan berkelanjutan di dunia harus mengintegrasikan multidisiplin dan menginterpretasikan keragaman budaya sebagai elemen utama strateginya. *Environmental Sustainability* didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan untuk berfungsi secara berkelanjutan, termasuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang.

Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan pola pembangunan lainnya yang selama ini dilaksanakan.

Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Menjamin pemerataan dan keadilan; strategi pembangunan yang berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor

produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan.

- b. Menghargai keanekaragaman hayati; keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang.
- c. Menggunakan pendekatan integratif; dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang.
- d. Menggunakan pandangan jangka panjang; untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berkelanjutan dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Dari gambaran di atas dapat kita kemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan berusaha menyatukan tiga dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menjadi suatu sinergi dalam meningkatkan kualitas manusia. Dimensi ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan tetap memfokuskan kepada pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas serta menyertakan eko-efisiensi di dalamnya. Dimensi sosial mencakup pemberdayaan, peran serta, kebersamaan, mobilitas, identitas kebudayaan, pembinaan kelembagaan, dan pengentasan kemiskinan. Dimensi ekologi itu sendiri bertujuan untuk integritas ekosistem, ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tanggapan isu global.

Pembangunan berkelanjutan pada kenyataannya merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” menurut Brundtland Report dari PBB 1987 (Chuzaemi, 2008:1).

Berdasarkan laporan WCED (*World Commission on Environment and Development*) dalam proses pembangunan berkelanjutan ada empat syarat yang harus dipenuhi :

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar,
2. Pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarynya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*).
3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran,
4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) (Chuzaemi, 2008: 1).

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah: Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya

tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya (Sumarwoto, 2008: 161).

Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai Sumber Daya Alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berkelanjutan secara langsung ditentukan oleh kualitas manusia dan lingkungannya. Pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan untuk generasi yang mendatang meskipun tidak membatasi generasi yang akan datang untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup.

4. Konsep *Green Moral*

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kebutuhan bersama yang membutuhkan adanya partisipasi Warga Negara dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan penanggulangi pengrusakan lingkungan hidup.

Orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Cara pandang dikhotomis yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme yang memandang bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan bahwa

manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan (White, 1967, Ravetz, 1971, Sardar, 1984, Mansoor, 1993 dan Naess, 1993). Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sains dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal, termasuk di negara kita.

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.

Masalah lingkungan hidup terkait dengan moral dan perilaku manusia karena lingkungan hidup lestari atau tidak tergantung dari moral dan perilaku manusia yang ada di sekitar. Oleh karena itu, pembenahan terhadap moral dan perilaku manusia melalui etika bersama yang menikat secara transenden. Etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat digali

dari Pancasila yang merupakan dasar negara yang memancarkan nilai-nilai etikan dan moral yang harus ditumbuhkembangkan dan diimplementasikan oleh setiap Warga Negara yang ada di Indonesia khususnya dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas dalam totalitasnya, dan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya yang berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Cara mengatasi masalah lingkungan hidup menurut (Keraf dalam Arne Naess 2006: xiv), ...dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta. Krisis lingkungan global bersumber dari kesalahan fundamental-filosofis dalam memahami dan perspektif manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Dalam menghadapi kesalahan pandang dari etika antroposentrisme, perlu pengembangan konsep Kewarganegaraan multidemensi, terdiri dari empat dimensi pokok yaitu, dimensi pribadi, dimensi sosial, dimensi spasial, dan dimensi temporal. Dimensi pribadi dari kewarganegaraan multidimensi membutuhkan pengembangan satu kapasitas pribadi dan komitmen untuk etika warga negara yang dikarakteristikan oleh kebiasaan pikiran, perasaan dan tindakan secara individu dan sosial. Sebagai warga negara, setiap individu harus meningkatkan:

- (a) kapasitas kita untuk berfikir secara kritis dan sistematis;
- (b) pemahaman dan kepekaan kita terhadap masalah-masalah perbedaan-perbedaan budaya;
- (c) pilihan kita terhadap pemecahan dan penyelesaian masalah yang bertanggung jawab, kooperatif dan tanpa kekerasan, dan;
- (d) keinginan kita untuk melindungi lingkungan hidup, membela hak azasi manusia, dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat (Budimansyah, 2008: 63).

Selanjutnya untuk memperbaiki salah pandang dari etika antroposentrisme selain pengembangan konsep Kewarganegaraan multidemensi, juga pengembangan pendidikan karakter bangsa. Dalam pengertian harfiah, istilah “karakter” lebih condong memiliki makna psikologis atau sifat kejiwaan karena terkait dengan aspek kepribadian (*personality*), akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dari yang lain atau kekhasan (*particular quality*) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dari orang lain. Dari konteks inipun, karakter mengandung unsur moral, sikap bahkan perilaku karena untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, hanya akan terungkap pada saat seseorang itu melakukan perbuatan atau perilaku tertentu (Sapriya, 2007: 105). Menurut Lickona, karakter dikonsepsikan memiliki tiga bidang yang saling terkait, yakni *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral behavior*. Oleh karena itu, karakter yang baik terdiri mengandung tiga kompetensi, yakni mengetahui hal yang baik (*knowing the good*), ada keinginan terhadap hal yang baik (*desiring the good*), dan melakukan hal yang baik (*doing the good*) sehingga pada gilirannya ia akan menjadi kebiasaan berfikir (*habits of the mind*), kebiasaan hati (*habits of heart*), dan kebiasaan bertindak (*habits of action*) (Sapriya, 2007: 108-109).

Etika antroposentrisme berasal dari pemikiran barat Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern meskipun terdapat kesalahan perspektif khususnya tentang norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam paham ini, hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi makhluk lain diluar manusia. Ketiga,

kesalahan cara pandang pada antroposentrisme tersebut diperkuat lagi oleh cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian dengan ciri utama mekanistik-reduksionistik. Dalam paradigma ilmu pengetahuan yang Cartesian, ada pemisahan yang tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Demikian pula, ada pemisahan yang tegas antara fakta dan nilai. Maka paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionis ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bersifat otonom, sehingga seluruh perkembangan ilmu pengetahuan dikembangkan dan diarahkan hanya demi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penilaian mengenai baik buruk ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama, adalah penilaian yang tidak relevan. Hal ini melahirkan krisis ekologi sekarang ini yang berawal dari sikap dan perilaku manusia. Masyarakat modern, perlu melindungi kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan tatanan hidup manusia. Diperlukan mekanisme yang efektif termasuk peraturan yang ketat, insentif, denda, pemantauan lingkungan, dan penilaian secara berkelanjutan. Nilai-nilai dasar dari masyarakat kita saat ini sering kali bersifat materialistik. Untuk mengubahnya diperlukan pendekatan yang komprehensif dan saling melengkapi, Wens (Indrawan,2007: 76). Etika Lingkungan perlu disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia, jika masyarakat kita sadar dan menganut prinsip-prinsip etika lingkungan maka pelestarian lingkungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dapat berjalan dengan baik.

Prinsip-prinsip etika lingkungan telah dibuktikan oleh banyak budaya tradisional yang ada di tanah air kita, mereka telah berhasil menyatu dengan lingkungannya, selama berabad-abad telah mencapai harmoni dengan alam.

Dalam budaya tradisional tersebut etika dan norma bermasyarakat telah mendorong individu atau perorangan untuk bertanggung jawab dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi contoh dan sekaligus prioritas bagi masyarakat modern dewasa ini, kenyataannya keserakahan yang tercermin dalam perilaku manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Dalam pendekatan antroposentrisme dapat dikemukakan bahwa pandangan manusia terhadap lingkungan hidup menempatkan kepentingan manusia (kepentingan ekonomi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan) terhadap lingkungan di pusatnya.

Kegiatan ekonomi yang berlebihan dapat mempengaruhi lingkungan hidup, karena penggunaan beberapa sumberdaya, produksi limbah dan modifikasi lingkungan hidup. Jika dampak itu melampaui kemampuan lingkungan hidup untuk memulihkan dirinya, maka perubahan itu sering mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia atau bahkan hilang sama sekali. Pandangan hidup kita berpindah dari ekosentris menjadi antroposentris, yaitu sebuah pandangan hidup yang menganggap alam diciptakan untuk kepentingan manusia. Pandangan hidup itu bersifat eksploitatif, yaitu sistem biogeofisik adalah sumberdaya yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin untuk mendukung pola hidup konsumtif. Akibatnya terjadilah deplesi sumberdaya dan rusaknya fungsi ekologi lingkungan hidup kita. (Soemarwoto, 2008: 85). Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa hal sebagai alasan mengapa perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Kenyataan yang ada di masyarakat saat ini kurang sadar dan kurang tumbuh sikap, perilaku yang ramah lingkungan. Menurut Budi (2003: 19).

Hal yang mempengaruhi kelestarian lingkungan yaitu orientasi pertumbuhan ekonomi, sikap hidup masyarakat.

Seringkali kegiatan yang pro lingkungan dipandang sebagai kegiatan yang anti pembangunan. Dengan demikian pertimbangan ekonomi sangat dipengaruhi pandangan bahwa aktivitas pro lingkungan adalah mahal. Disisi lain pandangan ini juga secara implisit mengandung asumsi bahwa lingkungan hidup hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi. Fungsi ekologisnya dianggap tidak ada, sehingga tidak perlu diperhitungkan. Manusia tidak sadar akan pentingnya fungsi ekologi ini. Fungsi ekologi merupakan layanan masyarakat yang bernilai ekonomis, kesehatan, dan sosial budaya, akan tetapi nilai itu tidak nampak dalam bentuk material (uang).

Para pakar ekonomi lingkungan memang telah mengembangkan metode untuk menghitung nilai ekonomi lingkungan, akan tetapi nilai itu hanya merupakan nilai potensi, nilai pengganti atau juga sering disebut dengan nilai bayangan (*shadow price*), seperti nilai keanekaragaman hayati, nilai genetik (plasma nutfah) yang salah satunya sebagai bahan baku obat-obatan. Kesulitan diperbesar dengan adanya jarak waktu dan ruang antara perbuatan dan dampak, sedang manfaat perubahan dapat dinikmati langsung.

Sikap hidup masyarakat, secara pasti dikatakan bahwa kebudayaan mempengaruhi sikap manusia terhadap lingkungan hidup. Sebenarnya manusia mempunyai ajaran untuk hidup yang serasi dengan lingkungan hidupnya, atau lingkungan alam. Ajaran ini baik dari segi Agama maupun Budaya. Ajaran ini yang menjadi dasar acuan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sikap hidup yang sepenuhnya berorientasi pada materialism akan membuat

manusia bersikap serakah. Seolah-olah sepenuhnya harus dimiliki. Misalnya, hutan dieksploitasi kemanfaatannya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan: (a) keperluan generasi mendatang dalam konteks ekonomi dan kelestarian alam, dan (b) keperluan penyelamatan hutan itu sendiri.

Sikap hidup sebagian masyarakat yang serakah ini merupakan yang paradoksal dengan sikap hidup yang diajarkan agama agar manusia hidup dalam kesederhanaan. Agama hadir untuk memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi manusia. Dengan demikian kaum agamawan saat ini hendaknya dituntut untuk memberikan pengajaran yang mengakar mengenai keselamatan lingkungan hidup.

Etika yang dimiliki seseorang merupakan alasan yang sah, untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Argumentasi ini timbul dari tatanan nilai berbagai agama, filosofi, dan budaya sehingga dapat dimengerti oleh kebanyakan anggota masyarakat. Argumentasi etika untuk melestarikan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati dapat menyentuh naluri dan sisi baik orang-orang. Argumentasi ini timbul dari penghargaan atas kehidupan, alam, kelemahan, rasa keindahan, keunikan, kecantikan dunia kehidupan, serta percaya pada ciptaan dan kebesaran Tuhan. Masyarakat seringkali dapat menerimanya, paling tidak sebagian besar masyarakat dapat mempertimbangkan argumentasi ini dalam tatanan kepercayaan mereka, pendapat Callicott (Indrawan, 2007;77)

Berbagai argumentasi etika dapat diajukan untuk melestarikan seluruh spesies dan komponen lain keanekaragaman hayati. Dengan demikian,

argumentasi-argumentasi di bawah ini penting bagi konservasi dan pelestarian lingkungan hidup:

- 1) Setiap spesies memiliki hak untuk hidup.
- 2) Spesies bukan manusia memang sering kali tidak memiliki moralitas hak dan kewajiban, dan bahkan seringkali tidak memiliki kesadaran.
- 3) Semua spesies saling tergantung satu sama lainnya.
- 4) Manusia bertanggung jawab sebagai penjaga bumi.
- 5) Manusia bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang.
- 6) Menghargai kehidupan manusia dan memperhatikan kepentingan umat manusia adalah serasi dengan menghargai keanekaragaman hayati.
- 7) Alam memiliki nilai spiritual dan estetika yang melebihi nilai ekonominya.
- 8) Keanekaragaman hayati dibutuhkan untuk memahami asal kehidupan.

Sebuah lingkungan memiliki arti yang sangat penting atas eksistensi manusia sebagai makhluk yang memiliki multi potensi sehingga perilaku dan etika moral Warga Negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pencapaian lingkungan hidup berdasarkan aspek filosofi dengan konsep *green moral* adalah nilai kemandirian, kekeluargaan, dan keaneka ragaman budaya bangsa Indonesiam yang membudayakan pelestarian lingkungan hidup seperti dalam konsep Jawa *memayu hayuning bawana* yang memiliki arti membuat keselamatan untuk buana dan dunia demi masa depan.

Berdasarkan aspek yuridis secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan dasar pencapaian lingkungan hidup yang baik dan sehat Kota Batu sesuai dengan peraturan daerah no 16 tahun 2009 tentang Perlindungan,

Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan, Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan daerah no 23 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas fokus masalah penelitian yaitu : Penguatan Partisipasi Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Konsep *Green Moral*. Berdasarkan masalah pokok penelitian di atas, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk kompetensi kewarganegaraan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup?
3. Bagaimana bentuk penguatan partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup?
4. Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup berdasar konsep *green moral* pada pembangunan berkelanjutan?
5. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun partisipasi warga negara dalam lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis tentang:

1. Bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup.
2. Kompetensi kewarganegaraan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup.
3. Bentuk penguatan partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup.
4. Partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan hidup berdasar konsep *green moral* pada pembangunan berkelanjutan.
5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam membangun partisipasi warga negara dalam lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi:

1. Kontribusi Pada Bidang Ilmu

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pengembang PKn, khususnya pengembangan kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan hidup.

2. Pengambil Kebijakan

Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambil kebijakan yang ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan hidup.

3. Masyarakat Sasaran Penelitian

Dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam ikut melestarikan lingkungan hidup.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini terdiri dari lima bab. Adapun isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari status sosial ekonomi, kualitas partai, partisipasi politik, dan pendidikan kewarganegaraan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam proses penelitian meliputi: Lokasi dan Objek Penelitian, Pendekatan dan Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data, Proses Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Prosedur Penelitian, Variabel dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan temuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.